



Subag Humas dan TU
BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tengah

Tahun :

2	0	1	7
---	---	---	---

Bulan :

1	2	3	4	5	6	✓	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	✓	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Entitas :

Provinsi	Palu	Donggala	Tolitoli	Buol	Sigi	Morowali Utara	Parigi Moutong	Poso	Morowali	Tojo Una-una	Banggai	Banggai Kepulauan	Banggai Laut
----------	------	----------	----------	------	------	----------------	----------------	------	----------	--------------	---------	-------------------	--------------

DPD-Pemprov Bahas hasil Pemeriksaan BPK

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI Komite IV dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Fokus Group Discussion (FGD) dengan Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah di ruang Polibu Kantor Gubernur, Rabu (11/7/2017). FGD ini digelar sebagai tindak lanjut ikhtiar hasil pemeriksaan semester II BPK Tahun 2016. Kegiatan yang bertema 'Opini Pengelolaan Keuangan Negara yang Objektif dan Berkualitas' ini mengundang seluruh bupati/walikota/bupati se-Sulteng, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan akademisi. Menindak lanjut Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia

Baca **BAHAS** di Hal. 7

BAHAS dari hal 1

Tahun 1945, pasal 22 D dan 23 E ayat 3 bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan DPD RI sesuai kewenangannya untuk ditindaklanjuti.

Selanjutnya disebutkan UUD Nomor 17 Tahun 2014 dalam pasal 249 ayat 1 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, DPR RI, DPD RI dan DPRD mengemukakan bahwa DPD menerima hasil pemeriksaan atas keuangan Negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan terhadap RUPF yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Disamping itu juga sebagai bahan dalam menyusun hasil pengawasan atau pelaksanaan UU APBN.

Dalam rilisnya, DPD RI telah menerima hasil pemeriksaan semester (Haspem) II Tahun 2016 dari BPK yang disampaikan pada sidang plapurna DPD pada (6/6/2017) lalu. Komite IV sebagai alat kelengkapan DPD RI yang memiliki ruang lingkup tugasnya.

"Di bidang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN, pajak, perimbangan keuangan pusat dan daerah, BPK, lembaga keuangan serta koperasi UMKM ditugaskan untuk membawasanya," kata Ketua Komite IV DPD RI Ajeb Padliandang Ia mengatakan Komite IV membentuk tiga tim untuk menindaklanjuti ke Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan Sulteng. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk FGD bekerjasama dengan pemprov.

Ikhtisar Haspem semester II Tahun 2016 meliputi RI Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan persentase 13 persen pada Pemerintah Pusat, 489 LHP atau 81 persen pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta 34 atau 6 persen LHP pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya.

Berdasarkan jenis pemeriksaan LHP dimaksud terdiri atas 91 LHP atau 1 persen keuangan, 316 LHP dengan persentase 53 persen kinerja dan 279 LHP atau 46 persen dengan nilai tertentu.

Sementara itu dalam rangkuman data yang di-himpun menyebutkan, secara umum BPK mengungkap terhadap 9 LKPD, BPK memberikan Opini Tanpa Pengecualian atau 1 dengan persentase 11 persen LKPD. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WDP) atau 7 atau 78 persen LKPD.

Sementara Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) memberikan 11 persen atau 1 LKPD. Pada 279 objek POU, BPK menyimpulkan rancangan sistem pengendalian internal (SPI) atas 2 objek pemeriksaan sudah sesuai dan 3 objek pemeriksaan cukup sesuai, 280 objek pemeriksaan belum sepenuhnya sesuai, serta 41 objek pemeriksaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan LHP yang disampaikan BPK kepada DPD RI, maka Komite IV sebagai alat kelengkapan DPD yang membina keuangan negara menggelar FGD guna menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Tujuannya adalah mendapatkan data, tanggapan dan penjelasan secara langsung tentang opini dan temuan-temuannya.

Disamping itu, DPD memperoleh masukan mengenai kendala dan usulan dalam tidak lanjut temuan-temuan BPK. Kemudian dukungan substansi bagi penyempurnaan kualitas pengelolaan keuangan negara. Di sisi lain dapat merintis alokasi pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh lembaga perwakilan dalam hal ini DPD dan DPRD.

Usai pemaparan, kegiatan dilanjutkan dialog antara peserta dengan Ketua Komite IV DPD RI Ajeb Padliandang. Anggota Komite IV DPD RI Dapil Suleng Shaleh Muhammad Aljufri, Staf Ahli Gubernur Rusdi Roeh, Ketua BPK RI Perwakilan Sulteng Bayu Sabartha serta akademisi dari Universitas Tadulako (Unstad). ***